

## MANAJEMEN RISIKO PEMBANGUNAN DAERAH

2024

PERWALI KOTA MADIUN NO. 18 LD 2024 / NO. 18 SERI G, 41 HLM

PERWALI KOTA MADIUN TENTANG MANAJEMEN RISIKO PEMBANGUNAN DAERAH

**ABSTRAK :** Untuk memberikan landasan dan kepastian hukum dalam mengatur dan mengintegrasikan penyelenggaraan manajemen risiko pembangunan daerah di pemerintah daerah, perangkat daerah, badan usaha, dan badan lainnya, serta guna mencapai tujuan pembangunan daerah untuk seluruh masyarakat Kota Madiun, risiko yang akan menghambat pencapaian tujuan pembangunan daerah perlu dimitigasi, sehingga perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Madiun tentang Manajemen Risiko Pembangunan Daerah.

- Dasar Hukum Perwali ini adalah : Pasal 18 ayat (6) UUD Tahun 1945; UU Nomor 16 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 13 Tahun 1954; UU Nomor 28 Tahun 1999; UU Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU Nomor 13 Tahun 2022; UU Nomor 20 Tahun 2023; UU nomor 23 Tahun 2014; UU Nomor 30 Tahun 2014; PP Nomor 49 tahun 1982; PP Nomor 60 Tahun 2008; PP Nomor 12 Tahun 2017; PP Nomor 12 Tahun 2019; Perpres Nomor 39 Tahun 2023; Permendagri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 120 Tahun 2018; Permendagri Nomor 77 Tahun 2020; Perda Kota Madiun Nomor 6 Tahun 2017; Perda Kota Madiun Nomor 3 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Perda Kota Madiun Nomor 7 Tahun 2022.
- Dalam Perwali ini mengatur mengenai Penerapan MRPD, Penerapan MRPD Lintas Urusan Pemerintahan, Kebijakan MRPD Lintas Urusan Pemerintahan, Struktur MRPD Lintas Urusan Pemerintahan, Kerangka Kerja MRPD Lintas Urusan Pemerintahan, Strategi Pembangunan Budaya Risiko Lintas Urusan Pemerintahan, Penerapan MRPD Perangkat Daerah meliputi Pembentukan Tim MRPD Perangkat Daerah, Kebijakan MRPD Perangkat Daerah, Struktur MRPD Perangkat Daerah, Kerangka Kerja MRPD Perangkat Daerah, Strategi Pembangunan Budaya Risiko Perangkat Daerah, Pembinaan MRPD, dan Ketentuan Peralihan.

**CATATAN :**

- Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 23 April 2024 dan ditetapkan tanggal 23 April 2024.